

ANALISIS REALISASI PROGRAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN BULELENG MELALUI PENGUKURAN *VALUE FOR MONEY*

Kt. Sudiarsa

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Ganesha
Jl. Udayana No. 12 C, (Kampus Tengah) Singaraja, Bali.

e-mail: ketutsudiarsa42@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui realisasi program Bappeda Kabupaten Buleleng tahun 2009-2011 ditinjau dari (1) sudut ekonomis, (2) sudut efisiensi, dan (3) sudut efektivitas. Subjek penelitian ini adalah Kepala Bappeda dan objeknya adalah kinerja keuangan. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder kuantitatif dan sekunder kualitatif yang diperoleh dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *value for money*. Dari hasil analisis dapat ditarik simpulan bahwa (1) realisasi program Bappeda dari sudut ekonomis yaitu 10 program tergolong sangat ekonomis, 17 program tergolong ekonomis, 4 program tergolong cukup ekonomis, 3 program tergolong kurang ekonomis, dan 1 program tergolong tidak ekonomis. (2) Realisasi program Bappeda dari sudut efisiensi yaitu 2 program tergolong efisien, 9 program tergolong cukup efisien, dan 25 program tergolong kurang efisien. (3) Keseluruhan realisasi program Bappeda dari sudut efektivitas tergolong efektif.

Kata Kunci: Realisasi program, *value for money*

Abstract

This study is a descriptive research which aimed to know about the realization of Bappeda's programs in Buleleng Regency, from year 2009 until 2011, reviewed from (1) economical aspect, (2) efficiency aspect, and (3) effectiveness aspect. The subject of this research was the Chairman of Bappeda, while the object was the financing performance. The data in this research were both secondary quantitative and qualitative which were collected through documentation and interviews. Those data then analyzed by using value for money measurement. Conclusions taken based on the analyzing result were, (1) reviewed from economical aspect, there were 10 programs from Bappeda's which were categorized into "very economical", 17 programs from Bappeda's into "economical", 5 programs into "quite economical", 2 programs into "less economical", and 1 last program into "was not economical". (2) Reviewed from efficiency aspect, there were only 2 programs which were categorized into "efficient", 9 programs into "quite efficient", and 25 programs into "less efficient". (3) Reviewed from effectiveness aspect, all of the realization programs were effective.

Key words: realization programs, value for money

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dengan sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih. "...orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance*

sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik" (Mardiasmo, 2002: 18). *Good governance* diciptakan untuk suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik politik maupun administratif sesuai harapan masyarakat (Hessel Nogi S, 2005). Saat ini organisasi sektor publik tengah menghadapi berbagai tantangan dan

tuntutan untuk bekerja lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas segala aktivitas yang dijalankan. "Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi" (Mardiasmo, 2002: 4).

Salah satu organisasi sektor publik yang mempunyai peran sebagai penunjang keberlangsungan pembangunan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda dibentuk berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2004. Terakhir adalah berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai implementasi dari PP. No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hal tersebut menyebabkan Bappeda mengalami perubahan struktur kelembagaan yang bertugas membantu Bupati di bidang perencanaan pembangunan dan mengkoordinasikan perencanaan, baik berupa perencanaan program kegiatan lintas sektor, vertikal maupun wilayah.

Program yang dijalankan Bappeda Kabupaten Buleleng adalah Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Informasi Pembangunan Daerah, Pengembangan Data Informasi, Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, serta Kerjasama Pembangunan.

Perencanaan program kerja yang strategis merupakan suatu cara menerapkan sumber daya yang tersedia dengan seoptimal mungkin dan produk-produk atau jasa yang akan disediakan. Esensi perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah pengambilan keputusan yang strategis, sehingga terbentuk perencanaan yang matang. Hal ini akan berdampak pada tercapainya tujuan secara

efektif dan efisien, Hadari Nawawi (2003). Perencanaan akan dijadikan acuan untuk menetapkan tujuan-tujuan dan juga perumusan dari penetapan keputusan yang akan dibuat.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari aktivitas sektor publik, mendorong keinginan dilakukannya pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara pemerintahan. Pengukuran kinerja akan membandingkan antara hasil dan perencanaan sehingga terdapat gambaran terhadap pelaksanaan program atau kegiatan, Indra Bastian (2006). Hal ini akan menunjukkan prestasi yang diraih organisasi sektor publik. Dijelaskan juga oleh Mulyadi (2007), kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu organisasi dalam mewujudkan perencanaan strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pahala Nainggolan (2007) menyatakan pengukuran kinerja dapat diketahui dengan memahami siklus manajemen strategis yang merupakan tahapan sangat vital bagi keberhasilan implementasi manajemen strategis. Implementasi rencana strategis akan dapat mencapai kualitas yang diinginkan jika ditunjang oleh pola pengukuran kinerja yang berada dalam koridor manajemen strategis. Pengukuran kinerja yang dimulai dari penetapan indikator kinerja dan diikuti dengan implementasinya memerlukan adanya evaluasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka perwujudan visi dan misi organisasi begitu juga target organisasi.

Tuntutan baru mengisyaratkan agar organisasi sektor publik dalam aktivitasnya mengaplikasikan *value for money*, karena diyakini melalui prinsip tersebut dapat memperbaiki kinerja sektor publik. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja sektor publik dengan memperhatikan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas program. Ditegaskan oleh Mardiasmo (2002: 131) "...*value for money* merupakan pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah. Pengembangan indikator kinerja sebaiknya memusatkan perhatian pada pertanyaan mengenai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program atau kegiatan". Masyarakat masih

menghendaki pertanggungjawaban dari sektor publik yang mencakup pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran dari program yang dijalankan. Indra Bastian (2006) menjelaskan tiga indikator kinerja sebagai berikut. (1) Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan atau perundang-undangan, dan sebagainya. (2) Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik. (3) Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka panjang (efek langsung).

Indikator *value for money* meliputi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Menurut Abdul Halim (2002), pengertian ekonomi mempunyai arti biaya terendah. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Pengertian ekonomi sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara berhati-hati serta cermat dan tidak ada pemborosan dalam pengelolaan sumber dayanya. Pengertian efisiensi menurut McDonald & Lowton (dalam Ratmiko & Winrsih, 2009: 174) "Suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik". Dijelaskan juga oleh Mulyadi (2007: 380), "Efisiensi dan produktivitas merupakan suatu ukuran tentang seberapa efisien suatu proses mengkonsumsi masukan, dan seberapa produktif suatu proses menghasilkan keluaran". Jadi secara umum pengertian efisiensi adalah suatu gambaran tentang masukan dan keluaran dengan fokus perhatian pada keluaran yang dihasilkan pada suatu proses penyelenggaraan setiap program. Kemudian

pengertian efektivitas menurut McDonald & Lowton (dalam Ratmiko & Winrsih, 2009: 174) "Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi". Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif proses kerja organisasi.

Sasaran pengukuran *value for money* adalah pengukuran kegiatan atau program secara finansial. Keterukuran program secara finansial akan tercermin dari laporan keuangan pemerintah daerah. Prasetya (2005: 5) menjelaskan "Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam mempertanggungjawabkan (*stewardship*) penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan padanya".

Langkah-langkah pengukuran *value for money* meliputi sudut ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. "Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter" (Mardiasmo, 2002: 4). Adapun perbandingan ekonomi dipaparkan sebagai berikut.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input value}} \times 100\% \quad (1)$$

Kemudian dijelaskan Mardiasmo (2002: 133), "Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*". Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan *value for money*. Adapun perbandingan efisiensi dipaparkan sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \quad (2)$$

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan, Mardiasmo (2002). Adapun perbandingan efektivitas dipaparkan sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Output}}{\text{Outcome}} \times 100\% \quad (3)$$

METODE

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif yang berfokus pada pengamatan realisasi program Bappeda melalui penerapan pengukuran *value for money* yakni sudut ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Subjek penelitian ini adalah Kepala Bappeda dan objek penelitiannya adalah kinerja keuangan.

Adapun metode pengumpulan data adalah (1) dokumentasi dan (2) wawancara. Dokumentasi dilakukan pada bagian keuangan untuk memperoleh kinerja keuangan tahun 2009-2011. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan umum kepada Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, selanjutnya pertanyaan secara langsung dan mengkhusus akan ditanyakan pada bagian keuangan untuk memperoleh informasi terkait dokumen anggaran maupun kinerja keuangan tahun 2009-2011.

Data bersumber langsung dari Bappeda Kabupaten Buleleng dan berjenis data sekunder. Data sekunder kuantitatif yang dimaksud adalah data keuangan Bappeda Kabupaten Buleleng. Sedangkan data sekunder kualitatif yang dimaksud adalah referensi beberapa buku yang menyangkut dan mendukung penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif yaitu analisis pengukuran *value for money* terhadap dokumen kinerja keuangan. Teknik analisis kuantitatif meliputi rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Adapun rasio-rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Rasio ekonomis ini menunjukkan perolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah.

$$\text{Rasio ekonomis} = \frac{\text{Target anggaran}}{\text{Anggaran dana}} \times 100\% \quad (4)$$

Tabel 1. Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

(Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996)

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan atas besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan program maupun kegiatan. Adapun Rasio efisiensi Bappeda sebagai berikut.

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Keluaran biaya}}{\text{Anggaran dana}} \times 100\% \quad (5)$$

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

(Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996)

Rasio efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Sesuatu dapat dikatakan efektif jika tujuan maupun sasaran dapat tercapai.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Keluaran Biaya}}{\text{Dampak dan hasil}} \times 100\% \quad (6)$$

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

(Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996)

HASIL

Temuan dalam penelitian ini adalah mengenai anggaran dan realisasi biaya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Bappeda. Dana yang digunakan Bappeda dalam menjalankan programnya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan laporan realisasi anggaran, dalam menjalankan program internalnya Bappeda menyelenggarakan kegiatan belanja langsung, dari anggaran dan realisasi biaya yang ada di Bappeda akan dianalisis secara berturut-turut selama tiga

tahun dari 2009-2011 dengan menggunakan pengukuran *value for money*, sehingga dapat diketahui kinerja Bappeda dalam mengelola keuangan secara internal.

Realisasi program pada Bappeda Kabupaten Buleleng dari sudut ekonomis

diketahui dengan melakukan perhitungan rasio ekonomis, kemudian dirumuskan kedalam kriteria kinerja keuangan. Uraian program dan rasio ekonomis Bappeda Kabupaten Buleleng tahun 2009-2011 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Program dan Rasio Ekonomis Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2011

No	Program	Rasio Ekonomis 2009 (%)	Rasio Ekonomis 2010 (%)	Rasio Ekonomis 2011 (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	87,60	84,76	95,70
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99,65	90,36	77,88
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	100,00	110,15	100,00
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	112,55	52,05	114,94
5	Informasi Pembangunan Daerah	100,00	100,00	100,00
6	Pengembangan Data Informasi	96,66	64,92	101,76
7	Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	96,04	94,77	104,61
8	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	-	71,43	150,85
9	Perencanaan Pembangunan Daerah	97,52	92,46	98,11
10	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	101,14	95,24	106,14
11	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	95,66	85,05	109,43
12	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	100,00	94,75	100,01
13	Kerjasama Pembangunan	-	-	-

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 4 terlihat bahwa Bappeda Kabupaten Buleleng setiap tahunnya memiliki program yang sama, namun khusus tahun 2009 Bappeda mempunyai program Kerjasama Pembangunan yang tidak direalisasikan di tahun 2010 dan 2011. Hal ini juga terlihat di tahun 2010 dan 2011 yang memiliki program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar yang tidak direalisasikan pada tahun 2009. Kegiatan pada masing-masing tahun ada yang berbeda ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan program maupun kegiatan untuk mendukung kinerja Bappeda. Penganggaran kurang baik memang terlihat di tahun 2009 dan 2010, banyak rasio yang menunjukkan kisaran 60-80%, hal ini disebabkan pengalokasian anggaran pada setiap program tidak memperhatikan target anggaran.

Perhitungan realisasi program setiap tahunnya akan disesuaikan dengan

program maupun kegiatan yang berjalan. Rasio ekonomisnya juga akan disesuaikan dengan dianggarkan atau tidaknya kegiatan tersebut. Hasil temuannya adalah ada beberapa kegiatan pada DPA tidak dianggarkan namun setelah perubahan pada DPPA terdapat anggaran untuk menyelenggarakan program tersebut. Rasio ekonomis program yang tidak dianggarkan pada DPA akan tidak bisa ditentukan kinerjanya secara ekonomis. Selanjutnya dari rasio-rasio tersebut akan dirumuskan ke dalam kriteria kinerja keuangan yang bersumber dari Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan.

Berdasarkan Tabel 4 terkait program dan kegiatan serta rasio ekonomis Bappeda tahun 2009-2011, akan ditentukan kriteria kinerja keuangan Bappeda dalam merealisasikan programnya pada tahun 2009-2011 seperti terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kriteria Kinerja Keuangan Realisasi Program Bappeda Kabupaten Buleleng Melalui Pengukuran Ekonomis Tahun 2009-2011.

No	Program	Kriteria Ekonomis 2009	Kriteria Ekonomis 2010	Kriteria Ekonomis 2011
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cukup Ekonomis	Cukup Ekonomis	Ekonomis
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ekonomis	Ekonomis	Kurang Ekonomis
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Ekonomis	Sangat Ekonomis	Ekonomis
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sangat Ekonomis	Tidak Ekonomis	Sangat Ekonomis
5	Informasi Pembangunan Daerah	Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis
6	Pengembangan Data Informasi	Cukup Ekonomis	Kurang Ekonomis	Sangat Ekonomis
7	Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Ekonomis	Ekonomis	Sangat Ekonomis
8	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	*	Kurang Ekonomis	Sangat Ekonomis
9	Perencanaan Pembangunan Daerah	Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis
10	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Sangat Ekonomis	Ekonomis	Sangat Ekonomis
11	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Ekonomis	Cukup Ekonomis	Sangat Ekonomis
12	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Ekonomis	Ekonomis	Sangat Ekonomis
13	Kerjasama Pembangunan	**	*	*

Keterangan: * = Tidak direalisasikan
 ** = Tidak dianggarkan dalam DPA

Realisasi program pada Bappeda Kabupaten Buleleng dari sudut efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara keluaran biaya dengan anggaran dana setelah perubahan. Pengukuran kinerja efisiensi menjadi hal yang sangat penting karena keberhasilan Bappeda dalam menggunakan dana akan terlihat dari

kinerja ini. Dana yang dianggarkan tidak semata-mata bisa dihabiskan namun disesuaikan agar tidak terjadi pemborosan, sehingga dana akan tersalurkan secara tepat sesuai dengan kebutuhan program. Uraian program dan kegiatan serta rasio efisiensi Bappeda tahun 2009-2011 dapat dijelaskan melalui Tabel 6.

Tabel 6. Program dan Rasio Efisiensi Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2011

No	Program	Rasio Efisien 2009 (%)	Rasio Efisien 2010 (%)	Rasio Efisien 2011 (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	89,32	94,05	96,70
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	71,73	96,89	99,09
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	97,93	100,00	99,08
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	93,75	86,23	100,00
5	Informasi Pembangunan Daerah	99,48	97,75	100,00
6	Pengembangan Data Informasi	88,57	89,63	99,93
7	Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	95,45	89,90	99,12

No	Program	Rasio Efisien 2009 (%)	Rasio Efisien 2010 (%)	Rasio Efisien 2011 (%)
8	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	-	67,01	99,47
9	Perencanaan Pembangunan Daerah	90,91	90,26	98,16
10	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	91,12	95,66	98,84
11	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	87,42	81,98	95,57
12	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	87,74	93,18	99,48
13	Kerjasama Pembangunan	85,19	-	-

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa ada program yang tidak bisa ditentukan rasio efisiensi karena tidak direalisasikan atau dijalankan, terlihat juga pada tahun 2011 rasio berkisar antara 90%-100% yang mengindikasikan kinerja yang kurang efisien dan cenderung mengalami penurunan kinerja dari tahun 2009 dan 2010.

Dari Tabel 6 akan diformulasikan menjadi kriteria kinerja yang bersumber dari Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan. Kriteria tersebut digunakan untuk melihat tingkat efisiensi program Bappeda yang dijalankan selama tahun 2009-2011 dan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kriteria Kinerja Keuangan Realisasi Program Bappeda Kabupaten Buleleng Melalui Pengukuran Efisiensi Tahun 2009-2011

No	Program	Kriteria Efisiensi 2009	Kriteria Efisiensi 2010	Kriteria Efisiensi 2011
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cukup Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Kurang Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kurang Efisien	Cukup Efisien	Kurang Efisien
5	Informasi Pembangunan Daerah	Kurang Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien
6	Pengembangan Data Informasi	Cukup Efisien	Cukup Efisien	Kurang Efisien
7	Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Kurang Efisien	Cukup Efisien	Kurang Efisien
8	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	*	Efisien	Kurang Efisien
9	Perencanaan Pembangunan Daerah	Kurang Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien
10	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Kurang Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien
11	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Cukup Efisien	Cukup Efisien	Kurang Efisien
12	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Cukup Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien
13	Kerjasama Pembangunan	Cukup Efisien	*	*

Keterangan: * = Tidak direalisasikan

Realisasi program pada Bappeda Kabupaten Buleleng dari sudut efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara keluaran biaya dengan dampak atau hasil

dalam mencapai tujuan program. Uraian program dan kegiatan serta rasio efektivitas Bappeda tahun 2009-2011 dapat dijelaskan melalui Tabel 8.

Tabel 8. Program dan Rasio Efektivitas Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2011

No	Program	Rasio Efektivitas 2009 (%)	Rasio Efektivitas 2010 (%)	Rasio Efektivitas 2011 (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	100,00	100,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	100,00	100,00
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	100,00	100,00	100,00
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00	100,00	100,00
5	Informasi Pembangunan Daerah	100,00	100,00	100,00
6	Pengembangan Data Informasi	100,00	100,00	100,00
7	Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100,00	100,00	100,00
8	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	-	100,00	100,00
9	Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	100,00	100,00
10	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100,00	100,00	100,00
11	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	100,00	100,00	100,00
12	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	100,00	100,00	100,00
13	Kerjasama Pembangunan	100,00	-	-

Terlihat pada Tabel 8 bahwa semua kegiatan maupun program memiliki rasio efektivitas sebesar 100%, hal ini dikarenakan bahwa Bappeda tingkat Kabupaten menyamakan *output* dan *outcome* nya. Berdasar dari Tabel 8 maka

akan dipaparkan kriteria kinerja keuangan yang bersumber dari Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan. Terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Kriteria Kinerja Keuangan Realisasi Program Bappeda Kabupaten Buleleng Melalui Pengukuran Efektivitas Tahun 2009-2011

No	Program	Kriteria Efektivitas 2009	Kriteria Efektivitas 2010	Kriteria Efektivitas 2011
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Efektif	Efektif	Efektif
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Efektif	Efektif	Efektif
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Efektif	Efektif	Efektif
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Efektif	Efektif	Efektif
5	Informasi Pembangunan Daerah	Efektif	Efektif	Efektif
6	Pengembangan Data Informasi	Efektif	Efektif	Efektif
7	Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Efektif	Efektif	Efektif
8	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	*	Efektif	Efektif
9	Perencanaan Pembangunan Daerah	Efektif	Efektif	Efektif
10	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Efektif	Efektif	Efektif
11	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Efektif	Efektif	Efektif
12	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Efektif	Efektif	Efektif
13	Kerjasama Pembangunan	Efektif	*	*

Keterangan: * = Tidak direalisasikan

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan dapat dilihat realisasi program dari sudut ekonomis *value for money*, menunjukkan program yang dijalankan selama tahun 2009-2011 berada pada kriteria tidak ekonomis sampai sangat ekonomis. Secara teoritis ekonomis menekankan pada penggunaan dana yang serendah-rendahnya guna menghindari pemborosan.

Temuan ini menunjukkan bahwa konsistensi penganggaran pada Bappeda Kabupaten Buleleng kurang baik, karena tidak memperhatikan kinerja yang sudah baik. Terlihat pada Tabel 4.2, pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tahun 2009 dan 2011 sudah menunjukkan kinerja sangat ekonomis yakni dengan rasio ekonomis 112,55% dan 114,94%, namun tahun 2010 terjadi sebaliknya, yaitu kinerjanya tergolong tidak ekonomis dengan rasio ekonomis sebesar 52,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi dana pada tahun 2010 tidak terlalu memperhatikan kebutuhan dana saat itu sehingga mengakibatkan terlalu besar dari target anggarannya.

Penganggaran kurang baik pun terlihat pada Program Pengembangan Data Informasi yakni pada tahun 2009 memiliki rasio ekonomis 96,66%, 2010 rasio ekonomisnya 64,92%, dan 2011 rasio ekonomisnya 101,76%. Hal ini mengindikasikan bahwa penganggaran selama dua tahun sebelumnya untuk program tersebut belumlah ekonomis, karena kinerja tahun sebelumnya tidak dijadikan dasar walaupun pada akhirnya memiliki kriteria sangat ekonomis. Kasus ini sama juga terjadi pada Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya yakni pada tahun 2009 memiliki rasio ekonomis 95,66%, namun di tahun 2010 menurun menjadi 85,05% dan kembali naik pada tahun 2011 menjadi 109,43%. Berbeda halnya dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2009 dan 2010 sudah tergolong ekonomis dengan rasio masing-masing 99,65% dan 90,36% tetapi tahun 2011 menjadi kurang ekonomis dengan rasio ekonomis 77,88%, berarti ada penurunan kinerja dari proses

penganggarannya yang kurang dicermati Bappeda.

Di luar program-program yang berjalan tidak ekonomis, kurang ekonomis maupun cukup ekonomis, ada juga program yang memiliki konsistensi anggaran yaitu pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Informasi Pembangunan Daerah. Bahkan di tahun 2011 terdapat tujuh program yang tergolong sangat ekonomis yang mengindikasikan adanya peningkatan kinerja.

Realisasi program yang diukur dengan rasio efisiensi terlihat bahwa Bappeda tidak melakukan kegiatan operasional organisasi dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Secara teoritis akan berbanding terbalik jika dilihat dari kajian efisiensi. Efisiensi menghendaki penggunaan anggaran yang serendah-rendahnya sehingga tidak terjadi pemborosan di setiap program karena dipaksakan untuk dihabiskan anggarannya.

Bappeda menyelenggarakan program dengan tingkat efisiensi yang masih tergolong kurang dan cukup efisien, hampir di semua program memiliki rasio antara 80-100% tergolong cukup efisien dan 90-100% tergolong kurang efisien. Namun ada dua program yang dapat mencapai tingkat efisien yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang pada tahun 2009 memiliki rasio 71,73%, hal ini dikarenakan beberapa jenis kegiatan yang dilakukan berada pada kriteria kurang efisien sampai sangat efisien. Pada program ini, biaya-biaya dapat ditekan sehingga pemborosan dapat dihindari. Hal ini juga terjadi pada Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar yaitu mencapai rasio efisiensi sebesar 67,01% pada tahun 2010 yang tergolong efisien. Program ini sudah menunjukkan program yang bisa menekan biaya serendah-rendahnya dari anggaran, namun kembali kurang efisien pada tahun 2011. Seharusnya tahun 2010 pada program tersebut dapat dijadikan pedoman untuk bisa memanfaatkan anggaran dalam menjalankan program secara tepat sehingga tidak terjadi pemborosan atau terpaksa dihabiskan.

Realisasi program dari sudut efisiensi membuktikan bahwa Bappeda belum melakukan penghematan, bahkan pada tahun 2011 semua program tergolong kurang efisien. Semua anggaran digunakan untuk menyelenggarakan program tersebut. Anggaran yang tersisa nantinya dapat dialokasikan untuk program lain yang masih memerlukan anggaran yang tinggi.

Berbeda halnya dengan tingkat ekonomis dan efisien, untuk rasio efektivitas semua program di setiap tahunnya memiliki kriteria yang tergolong efektif yakni mencapai rasio 100%. Dalam menyelenggarakan programnya Bappeda menyamakan antara keluaran dan hasil sehingga besar keluaran dengan semua biaya-biaya akan berakibat sama dengan hasilnya, tidak menutup kemungkinan sebenarnya, untuk setiap program berjalan sangat efektif bahkan sama sekali tidak efektif jika antara keluaran biaya dan hasil berbeda. Tingkat efektivitas akan berbanding terbalik dengan tingkat efisiensi.

SIMPULAN DAN SARAN

Selama tahun 2009-2011, (1) realisasi program Bappeda dari sudut ekonomis yaitu 10 program tergolong sangat ekonomis, 17 program tergolong ekonomis, 4 program tergolong cukup ekonomis, 3 program tergolong kurang ekonomis, dan 1 program tergolong tidak ekonomis. (2) Realisasi program Bappeda dari sudut efisiensi yaitu 2 program tergolong efisien, 9 program tergolong cukup efisien, dan 25 program tergolong kurang efisien. (3) Keseluruhan realisasi program Bappeda dari sudut efektivitas tergolong efektif.

Selanjutnya disarankan agar Bappeda Kabupaten Buleleng menggunakan pengukuran *value for money*, bijak dalam pengalokasian dana dalam penganggaran, mengontrol biaya-biaya pelaksanaan program, dan memperjelas dampak maupun hasil dari realisasi program.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Departemen Dalam Negeri. 1996. *Keputusan Dalam Negeri No. 690. 900-327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Sekretariat Negara: Jakarta.

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: ANDI Offset.

Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, Sistem Pelipatgandaan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

Nainggolan, Pahala. 2007. *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Nawawi, H. Hadari, 2003. *Manajemen Strategis Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prasetya, Edy. 2005. *Penyusunan & Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: ANDI.

Ratmiko & Atik Septi Winrsih. 2009. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.

Widodo. 2012. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta: MAGNAScript Publishing.